BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu strategi pokok pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023. Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan strategi untuk mencapai penurunan laju penduduk (LPP), angka kelahiran (Total Fertility Rate /TFR), keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kependudukan , KB, perempuan dan perlindungan anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengendalian Penduduk, KB dan Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses penurunan laju penduduk (LPP) dan perempuan terhadap program pembangunan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya adalah Dinas pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan Perda Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat betapa pentingnya pengendalian penduduk,keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan pengendalian penduduk,KB,Pemberberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut , tidak terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan.

- **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Menteri PP / PA Nomor
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
8. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
9. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 3 disebutkan bahwa " . . . Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat ... "
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Tap MPR RI Nomor 4 / MPR / 1999 tentang GBHN 1999, dijelaskan bahwar bidang sosial dan budaya, kedudukan dan peranan perempuan terdiri dari :
    - Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
    - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
24. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
25. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
26. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
27. Nota Kesepahaman antara Departemen Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dan Plan Indonesia Nomor : K. Tel. 232/HK 840/UTP cc/06 dan Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006.
28. Peraturan kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HL-010/B5/2009.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;

- **TUJUAN**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 73 Tahun 2016 tentang tentang Susunan struktur organisasi.

Kantor Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut di Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas pengendalian penduduk,Keluarga berencana,pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanah Laut

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempua dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan

dan Perlindungan anak mempunyai fungsi: Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Balai Penyuluhan KB; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut , terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
   (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
   (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
   (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
   (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
   (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
   (2) Seksi Keluarga Berencana;
   (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, terdiri dari :
   (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi ;
   (2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
   (3) Seksi Pengendalian Penduduk.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI

Sumber : Perbub No.73 Tahun 2016

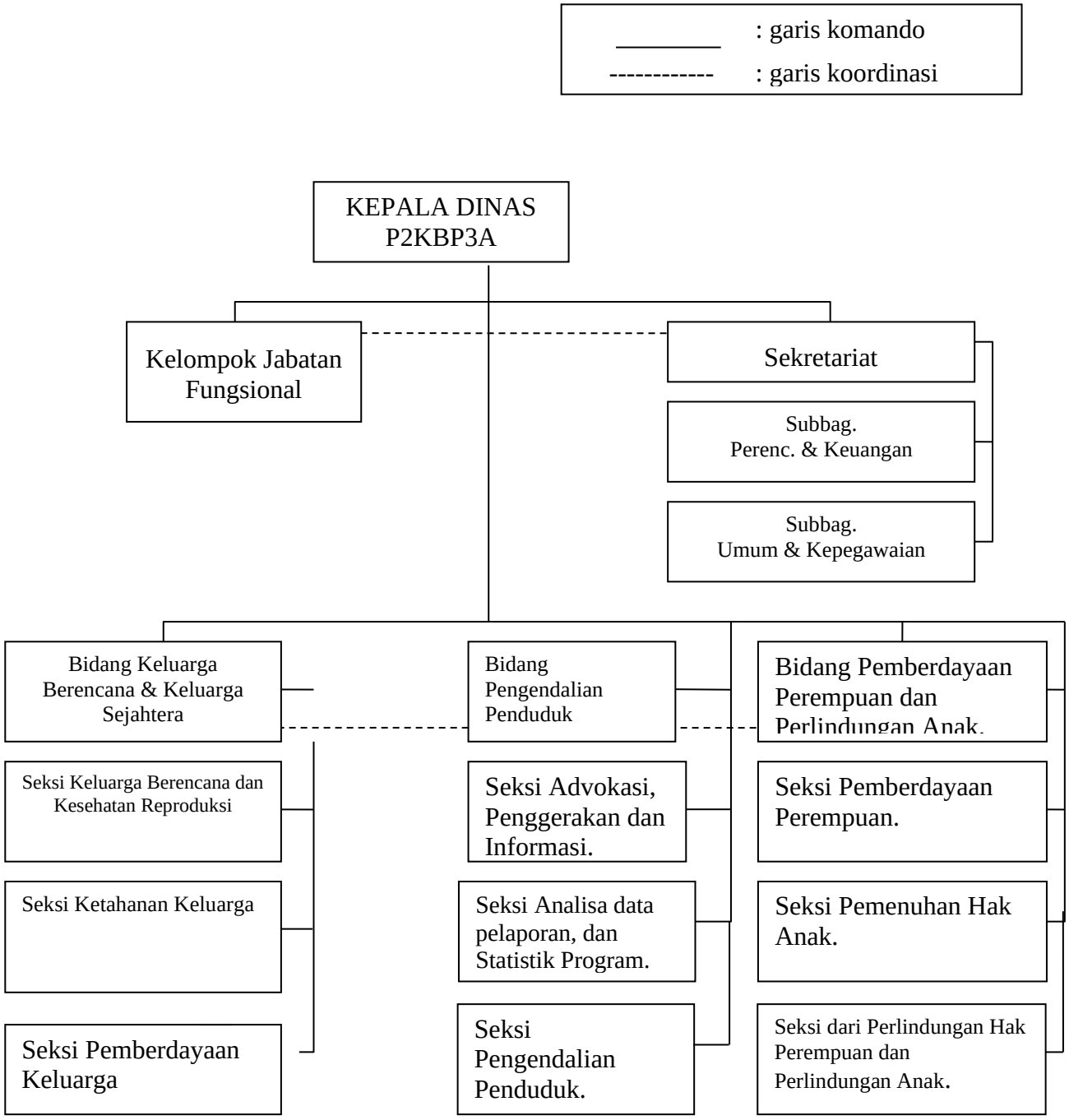

- **KONDISI KEPEGAWAIAN**

Tabel 1 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tahun 2018

No.	JABATAN	Gol.			Perempuan	
			Eselon	Formasi	L	P
1	Kepala Dinas	IV/ c	II.b	1	0	1
2	Sekretaris	IV/b	III.a	1	1	0
3	Kabid	IV.a	III.b	3	1	2
4	Kasubbid	III/d	IV.a	8	2	6
5	Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan	III / c	IV.a	11	8	3
6	Fungsional Umum	III / b	IV.b	11	7	4
		Jumlah		**35**	**19**	**16**

Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha per 31 Desember 2019

Tabel 2 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-Laki		Perempuan	
			2017	2018	2017	2018
1	S	Orang	2	2	1	1
2	S 1	Orang	9	9	15	15
3	D 3	Orang	2	2	3	3
4	SLTA	Orang	3	3	1	1
5	SLTP	Orang	1	1	0	0
	Jumlah	Orang	**17**	**17**	**20**	**20**

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha 31 Desember 2019

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Kend. Roda 2	Kend. Roda 4	Peralatan Kantor	Bangunan Kantor
92 unit bagi PLKB/PPLKB/PKB Staf pada BPPKB	7 Unit : Mobil Muyan, Mupen dan mobil operasional	Meja, Kursi, Lemari Arsip	1 unit gudang obat
		6 buah Lap –Top	11 kantor Balai Penyuluh KB
		2 bh Camera Digital	
		10 bh computer PC	

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai dan mendukung.

C. PRODUK DAN LAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan **bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana** maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) ;
2) Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15—49 tahun);
3) Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas ;
4) Peningkatan pembinanan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MJKP ;
5) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
6) Meningkatkan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa/kelurahan ;

7) Mewujudkan sistem data dan informasi kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan ;
8) Melakukan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan in formal yang melakukan pendidikan kependudukan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan **bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas perempuan yang berkeadilan gender /Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) ;
2) Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (KLA) ;
3) Meningkatkan Pemenuhan dan perlindungan Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan ;

.

Dari kegiatan tersebut, Dinas P2KB.PP dan PA Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan capaian indikator kinerja organisasi serta dalam melaksanakan kegiatan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak selalu berpedoman kepada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan Undang-undang Dasar RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

Capaian indikator kinerja yang strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah :

- Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ;
- Penurunan Angka Kelahiran (TFR) per WUS 15-49 Tahun ;
- Angka Pemakaian kontrasepsi modern/mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 tahun ;
- Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet-Need) ;
- Cakupan penyediaan informasi data makrokeluarga disetiap desa;
- Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek ;

- Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan indikator kompositnya adalan :
  - Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen ;
  - Prosentase perempuan Pengambilan Keputusan dan perempuan sebagai tenaga profesional ;
  - Prosentase Sumbangan Pendapatan Perempuan.
- Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan melakukan Pembentukan Gugus Tugas kecamatan/Desa Layak Anak di 11 Kecamatan/135 Desa dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) ;
- Persentase korban kekeraan termasuk TPPO (Tindak Pidana Pencegahan Perdagangan Orang)

  Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan pada perempuan.
- Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang penghapusan Eksploitasi seksual komersial Anak.
- Rencana Aksi daerah (RAD) tentang Penghapusan perdagangan (Traffiking perempuan dan Anak).

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini, kami mengucapkan terima kasih.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2018 Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman Peraturan Presiden Nomor

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini disajikan penjelaskan umum organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi tentang Latar Belakang, Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan terkait dengan capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN –LAMPIRAN .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. V I S I

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah yaitu : " **Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergis).**

B. M I S I

Untuk mewujudkan misi Bupati Tanah Laut terkait tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mewujudkan 4 (Misi) Yaitu :

1. **Misi ke I (Satu)** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sunber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya ;
2. **Misi Ke 2 (Dua)** yaitu Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif ;
3. **Misi ke 3 (Tiga)** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ;
4. **Misi ke 5 (Lima)** yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. T U J U A N

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan Kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pengembangan pembangunan ekonomi sosial dan budaya.
- ✓ Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi , social dan budaya (pembangunan inklusif)
- ✓ Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP)
- ✓ Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas

- ✓ Peningkatan pembinanan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MJKP Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
- ✓ Mewujudkan Keluarga bahagia dan sejahtera;
- ✓ Meningkatkan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa/kel
- ✓ Mewujudkan sistem data dan informasi kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- ✓ Melakukan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan in formal yang melakukan pendidikan kependudukan;
- ✓ Meningkatkan kualitas perempuan yang berkeadilan gender;
- ✓ Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (KLA);
- ✓ Meningkatkan Pemenuhan dan perlindungan Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- ✓ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Adapun hubungan antara Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan pada matriks di bawah ini.

Tabel 2.1 Matriks Antara Visi, Misi dan Tujuan

VISI	MISI	TUJUAN	Indikator Tujuan	Satuan	Target
Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovatif, Bertata, Religius, Aktual dan Sinergis)	1. Berkarya meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	3 Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pengembangan pembangunan ekonomi sosial dan budaya	Menurunkan Angka kelahiran Total (TFR)	%	2,22
	2 Menciptakan Inovasi di	1.Peningkatan inovasi dalam Pelayanan Publik			

	segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif				
	3.Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Goog Governance)	1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja;	Kriteria	75(BB)
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Skor	95 (A)
	5.Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan social budaya(Pembangunan Inklusif)	Meningkatkan kualtas hidup perempuan yang berkeadilan gender (Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,40
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,66
		Peningkatan pembinanan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MJKP	Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi Perempuan Menikah usia 15-49 tahun	%	90,10
		Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	%	9

		Meningkatkan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa/kelurahan	Meningkatkan kualitas pendataan dan informasi pengendalian penduduk	%	100
		Melakukan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan in formal yang melakukan pendidikan kependudukan	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	sekolah	11
		Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (KLA	Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (KLA	Skor	700
		Meningkatkan Pemenuhan dan perlindungan Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Meningkatkan Pemenuhan dan perlindungan Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	%	100
		Meningkatkan Akuntabilitaspemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Meningkatkan Akuntabilitaspemerintahandan reformasi pelayanan publik	Kriteria	100 (A)
				Skor	75 (BB)

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2019 - 2023), dapat dirumuskan yaitu :

- **Sasaran- 1** Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya;
- **Sasaran- 2** Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi;
- **Sasaran- 3** Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
- **Sasaran- 4** Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun;
- **Sasaran- 5** Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR);
- **Sasaran- 6** Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)
- **Sasaran- 7** Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel;
- **Sasaran- 8** Mewujudkan sistem data dan informasi kependudukan sebagai dasar pengambil kebijakan;
- **Sasaran- 9** Terbentunya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
- **Sasaran-10** Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender;
- **Sasaran-11** Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA) ;
- **Sasaran-12** Meningkatnya Pemenuhan dan perlindungan hak hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- **Sasaran-13** Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik.

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,66%
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	4	Total Fertility Rate (TFR	2,33%

3	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,40%
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA)	12	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 700

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
  - Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**
  - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
  - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
- **Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media :**
  - Penyebarluasan informasi kepada masyarakat

1. Program Keluarga Berencana didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga, dengan sub kegiatan :

a. Pelayanan KB dan Alat Kontarsepsi melalui kegiatan TKBK (Tim Keluarga Berencana Keliling) dan TMKK (TNI Manunggal KB - Kesehatan)

1.2. Kegiatan Pelayanan KIE (Komunikasi,Informasi dan Educatif), dengan sub kegiatan :

a. Pelayan KIE KB dengan melalui media Tradisional,media luar,media massa dan MUPEN (Mobil Keliling)

1.3. Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu, dengan sub kegiatan :

a. Sosialisasi Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan
b. Pelayanan Komplikasi Berat / Ringan
c. Pelayanan Pelepasan KB Implant dan IUD

1.4. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, dengan sub kegiatan :

a. Pembinaan kepada petugas KB di tingkat Lini.

1.5. Kegiatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR, dengan sub kegiatan

a. Orientasi kelompok KB Pria dalam KB KR.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja oleh kegiatan sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), dengan sub kegiatan

a. Orientasi Kesehatan reproduksi remaja melalui pengelola KIE KRR

3 . Program Pelayanan Kontrasepsi oleh kegiatan sebagai berikut:

3.1. Kegiatan Pelayanan Konseling KB, dengan sub kegiatan

a. Orientasi pelayanan konseling KB

3.2. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontarsepsi KB, dengan sub kegiatan

a. Pelayanan Pemasangan Implant dan IUD
b. Orientasi tentang resiko kemilan dan rasa aman Alkon bagi akseptor

3.3. Kegiatan Pelayanan KB medis Operasi, dengan sub kegiatan

a. Pelayanan KB Medis Operasi Wanita dan Medis Operasi Pria.

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri oleh kegiatan sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dengan sub kegiatan

a. Orientasi tentang kelompok – kelompok masyarakat peduli KB

4.2. Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat peduli KB, dengan sub kegiatan

a. Sosialisasi partisipasi dukungan program KB-KS melalui kader/ petugas PPKB/Sub PPKBD dan klmpk BKB, BKR, BKL BLK serta anggota Saka Kencana

4.3. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dengan sub kegiatan

a. Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengelola klmpok UPPKS

4.4. Kegiatan Pembinaan Petugas Pengelola program KB dan KS, dengan sub kegiatan

a. Orientasi Keluarga Harmonis Sejahtera, lomba PLKB/PKB, PPKBD/Sub PPKBD

4.5. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Program KB di Masyarakat, dengan sub kegiatan

a. Orientasi tentang pengelolaan progran KB

b. Evaluasi dan Monitoring pengelolaan program KB Tk Di 11 Kecamatan

4.6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, dengan sub kegiatan

a. Orientasi kader pendataan keluarga

b. Evaluasi dan Monitoring pendataan keluarga ke 11 Kecamatan

4.7. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli KB, dengan sub kegiatan

a. Pelatihan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan pelayanan kontarsepsi.

b. Evaluasi dan Monitoring pencatatan dan pelaporan di 11 Kecamatan

5. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat oleh kegiatan sebagai berikut:

5.1. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat, dengan sub kegiatan

a. Penyuluhan tentang kesehatan Ibu, Anak dan Bayi melalui kelompok di masyarakat.

6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR oleh kegiatan sebagai berikut:

6.1. Pelatihan bagi kelompok Remaja dan Pendidik Sebaya, dengan sub kegiatan

a. Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

b. Pelatihan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dalam rangka me antisipasi dari kenakalan remaja.

7 . Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU oleh kegiatan sebagai berikut:

7.1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU, dengan sub kegiatan:

a. Pembinaan pada kader BKB, kader Posyandu

b. Penyuluhan kepada Model Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

8 . Program Peningkatan penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS oleh kegiatan sebagai berikut:

8.1. Penyuluhan penanggulangan narkoba, dan PMS di sekolah, dengan sub kegiatan:

a. Pembinaan pada anak sekolah tentang dampak narkoba dan PMS

b. Penyuluhan kepada anak remaja dampak narkoba,PMS,HIV/AIDS terhadap kesehatan reproduksi.

9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

9.1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

9.2. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

9.3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan

10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

10.1. Kegiatan Pembinaan dan penilaian Lomba Desa P2WKSS, dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Pedum Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

b. Evaluasi Pelaksana Terbaik P2WKSS

c. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;

d. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Mengelola Usaha;

e. Forum Koordinasi terkait Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

f. Fasilitasi Validasi Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut.

10.2. Kegiatan Pembinaan dan penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI) sub kegiatan :

a. Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

b. Kecamatan yang dievaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

c. Pemahaman Pedum Gerakan Sayang Ibu (GSI)

11. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan , dengan sub kegiatan :

11.1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, dengan sub kegiatan

a. Sosialisasi dan Pelatihan peningkatan kapasitas organisasi perempuan sejumlah 38 Organisasi

b. Pembinaan Generasi Muda di Tingkat SMP dan SMA Se-Kab.Tanah Laut dan

c. Penyuluhan tentang penyakit AIDS/HIV dan PMS

d. Penyuluhan tentang Narkoba dan Obat terlarang.

11.2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan dengan sub kegiatan

a. Pembinaan dan pelatihan bagi kelompok Home Industri Perempuan sebanyak 30 Kelompok

12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan , dengan sub kegiatan :

12.1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, dengan sub kegiatan ;

a. Pembuatan Juklat Rencana Aksi Daerah (RAD) dan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender

b. Pemilihan Delegasi Forum Anak Kabupaten yang akan mengikuti Forum Anak Tk Provinsi dan Tinkat Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas, peran (partisipasi) dan Perlindungan Anak

13. Program Keluarga Berencana didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

13.1. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga, dengan sub kegiatan :

b. Pelayanan KB dan Alat Kontarsepsi melalui kegiatan PKBK dan TMKK

13.2. Kegiatan Pelayanan KIE, dengan sub kegiatan :

a. Pelayan KIE KB dengan melalui media Tradisional,media luar,media massa dan MUPEN

13.3. Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu, dengan sub kegiatan :

d. Sosialisasi Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan

e. Pelayanan Komplikasi Berat / Ringan

f. Pelayanan Pelepasan KB Implant dan IUD

13.4. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, dengan sub kegiatan :

a. Pembinaan kepada petugas KB di tingkat Lini.

13.5. Kegiatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR, dengan sub kegiatan

a. Orientasi kelompok KB Pria dalam KB KR.

14. Program Kesehatan Reproduksi Remaja oleh kegiatan sebagai berikut:

14.1. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), dengan sub kegiatan

a. Orientasi Kesehatan reproduksi remaja melalui pengelola KIE KRR

15 . Program Pelayanan Kontrasepsi oleh kegiatan sebagai berikut:

15.1. Kegiatan Pelayanan Konseling KB, dengan sub kegiatan

a. Orientasi pelayanan konseling KB

15.2. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontarsepsi KB, dengan sub kegiatan

a. Pelayanan Pemasangan Implant dan IUD

b. Orientasi tentang resiko kemilan dan rasa aman Alkon bagi akseptor

15.3. Kegiatan Pelayanan KB medis Operasi, dengan sub kegiatan

a. Pelayanan KB Medis Operasi Wanita dan Medis Operasi Pria.

16 . Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri oleh kegiatan sebagai berikut:

16.1. Kegiatan Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dengan sub kegiatan

a. Orientasi tentang kelompok – kelompok masyarakat peduli KB

16.2. Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat peduli KB, dengan sub kegiatan

a. Sosialisasi partisipasi dukungan program KB-KS melalui kader/petugas PPKB/Sub PPKBD dan klmpk BKB, BKR, BKL BLK serta anggota Saka Kencana

16.3. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dengan sub kegiatan

a. Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengelola klmpok UPPKS

16.4. Kegiatan Pembinaan Petugas Pengelola program KB dan KS, dengan sub kegiatan

a. Orientasi Keluarga Harmonis Sejahtera, lomba PLKB/PKB, PPKBD/Sub PPKBD

16.5. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Program KB di Masyarakat, dengan sub kegiatan

a. Orientasi tentang pengelolaan progran KB

b. Evaluasi dan Monitoring pengelolaan program KB Tk Di 11 Kecamatan

16.6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, dengan sub kegiatan

a. Orientasi kader pendataan keluarga

b. Evaluasi dan Monitoring pendataan keluarga ke 11 Kecamatan

16.7. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli KB, dengan sub kegiatan

a. Pelatihan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan pelayanan kontarsepsi.

b. Evaluasi dan Monitoring pencatatan dan pelaporan di 11 Kecamatan

17 . Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat oleh kegiatan sebagai berikut:

17.1. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat, dengan sub kegiatan

a. Penyuluhan tentang kesehatan Ibu, Anak dan Bayi melalui kelompok di masyarakat.

18 . Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR oleh kegiatan sebagai berikut:

18.1. Pelatihan bagi kelompok Remaja dan Pendidik Sebaya, dengan sub kegiatan

a. Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

b. Pelatihan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dalam rangka me antisipasi dari kenakalan remaja.

19. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU oleh kegiatan sebagai berikut:

19.1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU, dengan sub kegiatan:

a. Pembinaan pada kader BKB, kader Posyandu

b. Penyuluhan kepada Model Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

20 . Program Peningkatan penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS oleh kegiatan sebagai berikut:

20.1. Penyuluhan penanggulangan narkoba, dan PMS di sekolah, dengan sub kegiatan:

a. Pembinaan pada anak sekolah tentang dampak narkoba dan PMS

b. Penyuluhan kepada anak remaja dampak narkoba,PMS,HIV/AIDS terhadap kesehatan reproduksi.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Keterangan
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	- Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,66	**Program Keluarga Berencana** Kegiatan : • Advokasi pelayanan KIE • Pembinaan Keluarga Berencana	**Tanggung Jawab Ess.II**
2.Menurunnya angka kelahiran total(TFR) per WUS 15-49 tahun	Total Fertility Rate (TFR	%	2,33	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri** Kegiatan : • Pemberdayaan ekonomi keluarga • Pembinaan petugas pengelola program KB dan keluarga sejahtera • Pengelolaan program KB di masyarakat • Pengelolaan data dan imformasi program KB • Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli KB	**Tanggung Jawab Ess.II**
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	-Angka Pemakaian kontrasepsi modern/mCPR bagi	%	77,76	**Program KKBPK (Kependudukan,**	**Dikerjakan oleh Ess. IV**

	Perempuan Menikah usia 15-49 tahun				
4.Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)	-Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet-Need)	%	9	**Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) lini lapangan** Kegiatan : b. Operasional Bagi Balai penyuluhan KB (DAK Non Fisik) c. Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon) (DAK Non Fisik) d. Operasianal integritas program KKBPK dan program pembengunan lainnya di kampung KB (DAK Non Fisik) e. Operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan sub PPKBD) (DAK Non Fisik) f. Dukungan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen (DAK Non Fisik)	**Dikerjakan oleh Ess.IV**

5.Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel	-Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga disetiap desa	%	100	**Program meningkatnya dukungan sarana pelayanan KB** Kegiatan : • Pengadaan sarana dan transportasi pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)	**Dikerjakan OlehEss.IV**
6.Terwujudnya sistem data dan informasi kependudukan sebagai dasar pengambil kebijakan	-Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek	Dok	1	**Program meningkatnya dukungan sarana penyuluhan KB** • Pengadaan sarana kerja petugas lapangan KB (DAK Fisik)	**Dikerjakan OlehEss.IV**
7.Terbentuknya sekolah siaga kependudukan (SSK)	-Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Sekolah	11	**Program pengendalian penduduk** • Pembinaan koalisi kependudukan	**Tanggung Jawab Ess.III**

8.Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	-Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,40	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** • Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdyaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) • Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. • Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	**Tanggung Jawab Ess.II**
9.Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA)	-Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Skor	700	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan** Kegiatan : - Pembinaan dan Penilaian lomba desa P2WKSS	**Tanggung Jawab Ess.II**
10.Meningkatnya Pemenuhan	-Persentase korban	%	100	**Program peningkatan peran serta dan**	

dan perlindungan hak hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.	kekeraan termasuk TPPO			**kesetaraan gender dalam pembangunan** Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	**Dikerjakan oleh Ess.IV**
11.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilatas Kinerja (SAKIP)	Skor	75 (BB)	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor	**Dikerjakan Ess.IV**

				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perindang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah - Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	
12.Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	-Indeks kepuasan masyarakat	Skor	95	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** - Pengadaan peralatan gedung kantor	**Dikerjakan Oleh Ess.IV Tanggung Jawab Ess.III**

	Jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Klmpk	38	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasd/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor **Program kerjasama informasi dengan mas media** Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	**Dikerjakan Oleh Ess.IV**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja serta pengungkapan (disclo sure) secara memadai hasil analisis terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Per-Men-PAN dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014, tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap evaluasi kinerja akuntabilitas kinerja pemerintah, menggunakan kebijakan Per-Men-PAN dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2012, Sebagai berikut :

I.SKALA PENILAIAN :

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	**AA**	>90 – 100	Istimewa
2.	**A**	>80 – 90	Memuaskan
3.	**BB**	>70 – 80	Sangat Baik
4.	**B**	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	**CC**	>50 – 60	Cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	**C**	>30 – 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	**D**	>0 – 30	Sangat kurang, perlu sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

II.KOMPONEN YANG DINILAI :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	35%
2.	Pengukuran Kinerja	20%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Kinerja	10%
5.	Capaian Kinerja	20%
	Nilai Hasil Evaluasi	**100%**

A. CAPAIAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan Kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam Tahun Anggaran 2019.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukannya penghitungan akan dilakukan selisih atau celah kinerja (*performence gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performent improvement*).

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1. Dinas P2KBP3A adalah salah satu SKPD yang mengendalikan Pertumbuhan Pddk melalui program KB. 2. UU.No.52 Thn 2009 Ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 3.Peraturan Kepala BKKBN No.55/HK-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	Jumlah penduduk tahun ini **dikurangi** jumlah penduduk tahun kemarin X 100%	Bidang Pengendaliaan Penduduk

2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Total Fertility Rate (TFR)	- Total Fertility Rate(TFR) adalah hal yang wajib masuk dalam Indikator kinerja karena menyangkut pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan yang lebih di kenal PUP. - Jumlah angka fertilitas menurut umur (rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (monopause)	$\sum_{i}^{7} = 1$TFR = 5 ASFR i	Bidang Pengendaliaan Penduduk

3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. Prosentase perempuan yang aktif dalam Pembangunan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan program pangarusutamaan gender yang dilaksanakan di Kab. Tala. 2. Prosentase Perempuan dapat menunjukkan Peran Perempuan dalam kehidupan Ekonomi dan Politik dengan : Indeks Keterwakilan di Parlemen. Indeks Pengambilan Keputusan. Indeks Distribusi Penghasilan. 3. Menetapkan perlindungan hokum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.	IDG merupakan indikator komposit melihat pesan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik 1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan	Bidang PP/ PA

			4. Untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku Diskriminatif. 5. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hokum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Daerah maupun Provinsi. 6. % prenpuan yang aktif dlm pembangunan Merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. 7. Difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.		
4	Terwujudnya Kabupaten	~ Tingkat Capaian Kabupaten		Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Bidang PP /PA

	Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA)	Layak Anak	- KLA salah satu IKU Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	

2. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA ((IKU)

No	Sasaran Strategis	Satuan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,66
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	%	Total Fertility Rate (TFR)	2,33
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	%	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,40
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA)	Skor	~ Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	700

3. Uraian Capaian Indikator Kinerja Utam (IKU)

Untuk setiap pernyataan Indikator Kinerja Utama tersebut, dilakukan analisis capaian IKU sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,66	1,21	72,89	2015=338.291 2016=340.909 2017=346.771 2018=347.893 2019=349.826
LPP = Jumlah penduduk tahun ini **dikurangi** Jumlah penduduk tahun kemaren x 100% ⬇ **Tahun 2019 = 349.826 – Tahun 2018 = 347.893 x 100% = 1,21%**							

Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut salah satu SKPD yang diberi amanat untuk bertanggung –jawab untuk menekan pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan melalui program Keluarga Berencana (KB). Jumlah penduduk Kabupaten Tanah laut pada tahun 2018 sebesar 347.893 jiwa telah berkembang menjadi 349.826 jiwa pada tahun 2019. Hal ini berarti selama kurun waktu 2015 – 2019 angka pertumbuhan penduduk **naik**. Melihat rata –rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tiap tahun selama lima (5) tahun dari data penduduk tercatat bahwa LPP Kabupaten Tanah Laut terjadi **kenaikan** dari kurun waktu 2015 – 2019 **sebesar 1,21%** dari target renstra **sebesar 1,66%**, sehingga capaian kinerja terdapat sebesar 72,89 % (Dapat dilihat dari table Perbandingan).

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja utama tersebut melalui Program Keluarga Berencana **(*Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera)*** dan kegiatan

pembinaan Keluarga Berencana, ***(Seksi Ketahanan Keluarga) dan Kegaiatan : Pembinaan Koalisi Kependudukan). (Eselon II)***

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP).	1,18	1,20	1,21	1,56

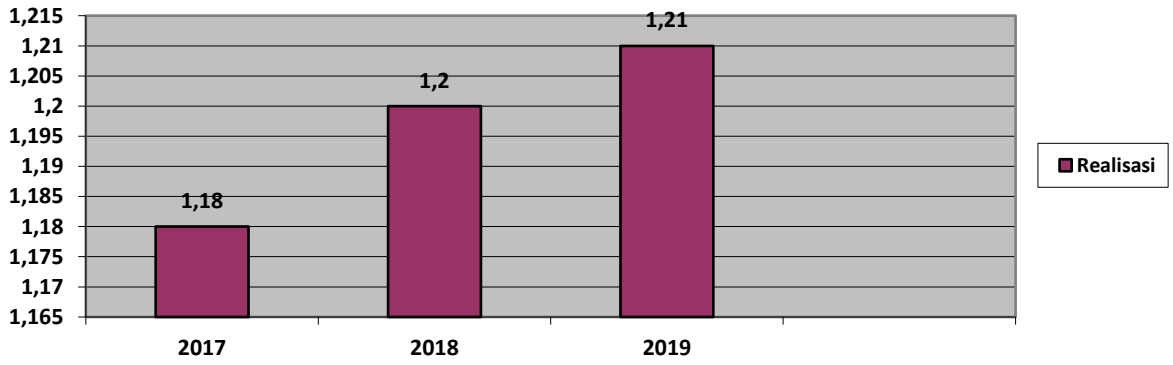

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Masih rendahnya memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Peningkatan sosialisasi secara berkesinambungan kepada peserta didik tentang materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Peningkatan penyuluhan memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) kepada peserta didik. secara tatap muka melalui Ajang kreatif Gen-Re (Generasi Berencana).

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN);
- Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan , Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan;
- Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.

Foto : Kegiatan Ajang Kreatif Gen-Re (Generasi Berencana) , program Gen-Re merupakan program BKKBN pusat yang meng-edukasi pemuda untuk menghindari terjadinya pernikahan dini, dari anak muda sudah merencanakan, tidak hanya kelahiran, tapi mulai dari merencanakan pendidikan, kesempatan bekerja, baru merencanakan keluarga.

Foto kegiatan : Sosialisasi kependudukan pada tanggal 27 Juni 2019 dihadiri Bupati, kepala Dinas, Kabid, Kasi Sekretaris dan seluruh kader PKBD dan Sub PKBD Se-kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disampaikan Sambutan Bupati Tanah Laut, bahwa hakekat pembangunan kependudukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan baik penduduk sebagai pelaku pembangunan untuk menuju terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang serta mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi. Penduduk yang dimulai dari pembangunan keluarga yang hidup dalam lingkungan yang sehat sebagaimana diperkirakan 10 bayi lahir setiap hari dan setiap tahun bertambah. Aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan, sementara menurut Bupati Tala pentingnya parameter kependudukan yang digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas penduduk.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Total Fertility Rate (TFR	%	2,33%	2,99	128,32	Udk:Jumlah perempuan lahir/Jmlh total Perempuan Kab.Tala x100%

$\sum_i^7 = 1$

TFR = 5 ASFR i

5 x 0,45 (Data didapat berdasar hasil susenas Tahun 2019

Total Fertility Rate (TFR) dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur, penduduk akan tumbuh seimbang jika angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) yang menunjukkan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur mencapai 2,1 anak, ini berarti jumlah penduduk yang lahir dan meninggal sama/seimbang, Target Total Fertility Rate (TFR)di Kabupaten Tanah pada tahun 2019 **sebesar 2,33% terealisasi sebesar 2,99 % artinya** jumlah penduduk yang lahir dan meninggal tidak sama/seimbang , jadi angka kelahiran di Kabupaten Tanah Laut naik (dapat dilihat table di bawah ini) ,

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja utama tersebut melalui Program Keluarga Berencana **(*Bidang Keluarga Berencana)*** dan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana, ***(Seksi Pemberdayaan keluarga)***

(Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana) (dikerjakan oleh Eselon III)

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	**2,58** (1.189/162 .848)x5	**2,54** (842/165. 176)x5	**2,99** (2.227/ 167.571)x5	2,22

Ket. bila jmlh klhiran kecil = kalikan 5. Bila jmlh kelahiran tinggi x5x0,45.

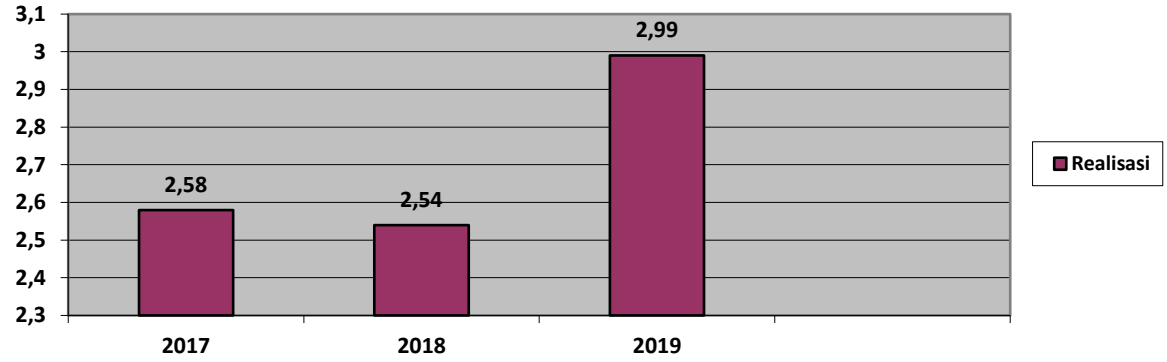

Gerakan untuk membentuk keluarga kecil yang sehat dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran dan perencanaan jumlah keluarga dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi Jangka panjang yang efektif dan efisien seperti implant, IUD, MOP, MOW.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dam Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP)
- Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa;
- Peserta PUS yang Tidak ingin Anak Lagi (TIAL) tetapi tidak memakai Alat kontrasepsi/ tidak ber-KB;
- Peserta PUS yang Ingin Anak ditunda (IAT) tetapi tidak memakai Alat kontrasepsi/ tidak ber-KB

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Penambahan formasi PLKB ;
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran;
- Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak (siaran Radio, brosur,Leafleat dan Spanduk).
-

Faktor pendukung / Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan;
- Adanya peran Tenaga PLKB dan PKB serta PPKBD di tiap desa.
- Memberikan informasi secara berkesinambungan untuk menjadi peserta KB;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana serta jaminan ketersediaan Alat dan obat Kontrasepsi yang memadai (Mobil Alokon) ;

Foto : Mobil Distribusi untuk mengantar Alat dan obat kontrasepsi ke klinik tingkat desa.

<u>Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :</u>

- Penambahan formasi PLKB ;
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran;
- Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak (siaran Radio, brosur,Leafleat dan Spanduk).

Foto : Pemasangan Alat Kontrasepsi jenis Implant dan MOW

Pemasangan alat kontrasepsi modern jenis implat dan MOW dilakukan oleh Petugas/Bidan pada tanggal 03 September 2019.

Foto Kegiatan : Penyuluhan Kepada PUS yang punya Balita

Pertemuan dengan PUS yang baru lahir dan punya Balita di Kecamatan Jorong tanggal 14 Agustus 2019. Penyuluhan dilaksankan oleh Kabid KB/KS tentang 8 fungsi Keluarga yang terdiri dari 1.Fungsi Agama, 2.Fungsi Sos-Bud,3.Fungsi Cinta kasih sayang, 4.Fungsi Perlindungan,5.Fungsi Reproduksi, 6.Fungsi Sosialisasi & Pendidikan, 7.Fungsi Ekonomi. 8.Fungsi Lingkungan.

Foto Kegiatan : Pelayanan Alat kontrasepsi gratis bersama dengan Manunggal Tuntung Pandang,TNI Manunggal Kesehatan (TMKK).

	Strategis	Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,40	65,96	96,43	

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)

Keterangan :

Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen

IDM = Indeks Pengambilan Keputusan

Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indicator untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dan sebagai tolak ukur keberhasilan program pengarustamaan gender yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten

Tanah Lautln Target IDG pada tahun 2019 sebesar 68,40% terealisasi sebesar 65,96 % dengan Capaian kinerja 96,43 % .

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja utama tersebut melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan **(*Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)*** dan ***(Seksi Pemenuhan Hak Anak)*** **Kegiatan :** Peningkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak. (dikerjakan oleh Eselon III)

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	65,99	65,95	65,95

1) Sumber : BPS Tahun 2019

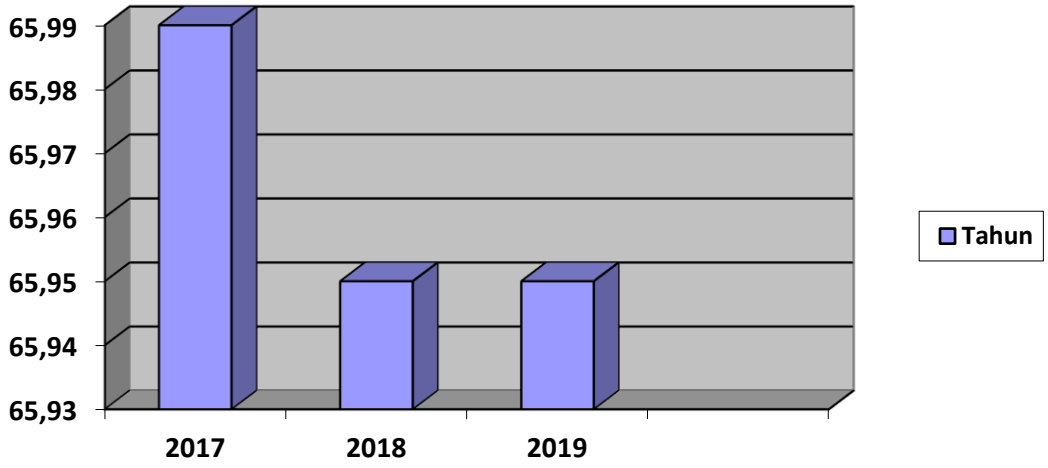

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik,

IDG terdiri dari 3 (tiga) Indikator komposit yaitu :

1) Indeks keterwakilan di parlemen artinya Keterlibatan perempuan di parlemen **masih rendah**;
2) Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan indicator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja professional dan teknisi **masih rendah** dan masih didominasi kaum laki-laki;
3) Peran perempuan dalam sumbangan pendapatan keluarga dengan indicator

persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan, di Kabupaten Tanah Laut upah buruh untuk kaum perempuan masi h rendah sehingga membawa dampak **rendahnya** sumbangan pendapatan perempuan.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG);
- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG);
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

Faktor pendukung / Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Penyempurnaan proses pembentukan peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender ;
- Pelaksanaan revieu dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender;
- Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG;
- Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum,masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;

- Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi , pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat;
- Penguatan system penyediaan , pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Foto kegiatan : Pelatihan sasirang di desa kampung baru kec.Pelaihari di ikuti peserta dari sungai riam tanggal 19 Februari 2019 untuk menambah keterampilam pada kelompok home industri untuk menambah **Sumbangan Pendapatan /Penghasilan Keluarga.**

Foto kegiatan : Pembinaaan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera) tanggal 27 Mei 2019 di Kecamatan Jorong.

Foto kegiatan : Pembinaan GSI /KSI (Gerakan Sayang Ibu / Kasih sayang Ibu) tanggal 24 Mei 2019 di desa bajuin Kecamatan Pelaihari.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Catatan

4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA).	~ Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)	78,71%	

Kriteria Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian

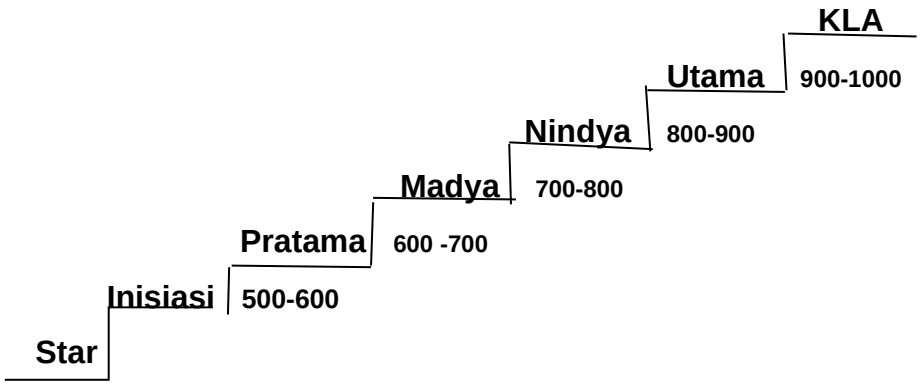

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wali kota dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pada tahun 2019 ini sudah mendapatkan hasil penilaian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dengan kriteria predikat **Pratama** (551) dari target **Madya (700)** karena ada instrument indicator yang tidak terealisasi. Untuk Pencapaian pada indikator kinerja utama tersebut melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ***(Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)*** dan ***(Seksi Pemenuhan Hak Anak)*** **Kegiatan :** Peningkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak. (dikerjakan oleh Eselon II)

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023

4.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA).	204,1	541,70 (Pratama)	551 (Pratama)	700 (Madya)

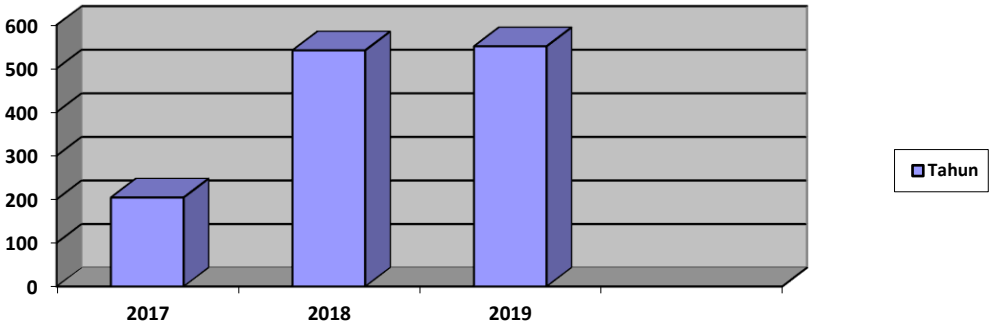

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Belum semua sekolah dan puskesmas di Kabupaten Tanah Laut didesain Ramah terhadap Anak;
- Sumber Daya Manusia (SDM) selalu berganti dikarenakan promusi dan mutasi jabatan,sedangkan SDM tsb sebagai penggerak program khususnya Gugus Tugas Kota Layak Anak baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- Belum maksimal peran di luar pemerintah seperti : Dunia Usaha, Lembaga masyarakat dan media.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan menciptakan inovasi baru dan terobosan seperti bekerjasama dengan lembaga Pendidikan Ramah Anak menggandeng Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap Sekolah.
- Mengoptimalkan peran satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA) di lingkungan masyarakat.

Faktor pendukung / Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Melaksanaka Koordinasi dan Sosialisasi penggarapan Gugus Tugas KLA di Kecamatan/Desa kerjasama dengan Camat, Kepala Desa dan unsur muspika.
- Mencetak Leaflet, Brosur, Spanduk tentang penting KLA.
- Siaran lewat media elektronik, siaran radio tentang KLA.
- Pembuatah Baliho.

- Melaksanaka Koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 11 kecamatan

Foto : Kegiatan Rapat koordinasi dan Sosialiasi Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan / Desa Layak Anak dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di kecamatan Bati-Bati tanggal 7 Oktober dihadiri Kepala Dinas P2KBP3A Kab.Tala , Kabid PP/PA , Camat Bati-Bati seluruh unsur Muspika Kecamatan Bati-Bati.

Foto : Kegiatan rapat Koordinasi Unit-Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP-PKSAI) tanggal 9 Oktober 2019 di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

.

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1. Sasaran Strategis sesuai renstra dan target/ Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) tiap triwulannya pada tahun 2019, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu Triwulan berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci diuraikan sebagai berikut:

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

2. Uraian Capaian Sasaran

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan uraian sebagai berikut :

Sasaran Strategis -1 Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP).

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan

1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,66	1,21	72,89	2015=338.291 2016=340.909 2017=346.771 2018=347.893 2019=349.826

LPP = Jumlah penduduk tahun ini **dikurangi** Jumlah penduduk tahun kemaren * %

Tahun 2019 = 349.826 – Tahun 2018 = 347.893 * 100% = 1,21%

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannnya untuk memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan Penduduk menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Tahun 2019 LPP pada dinas P2KBP3A mempunya target 1,66% realiasi sebesar 1,21 % artinya LPP pada Tahun 2019 capaian kinerja 72,89 %.Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Keluarga Berencana **(*Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera)*** dan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana, ***(Seksi Ketahanan Keluarga) dan Kegaiatan : Pembinaan Koalisi Kependudukan).*** ***(dikerjakan oleh Eselon IV)***

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP).	1,18	1,20	1,21	1,56

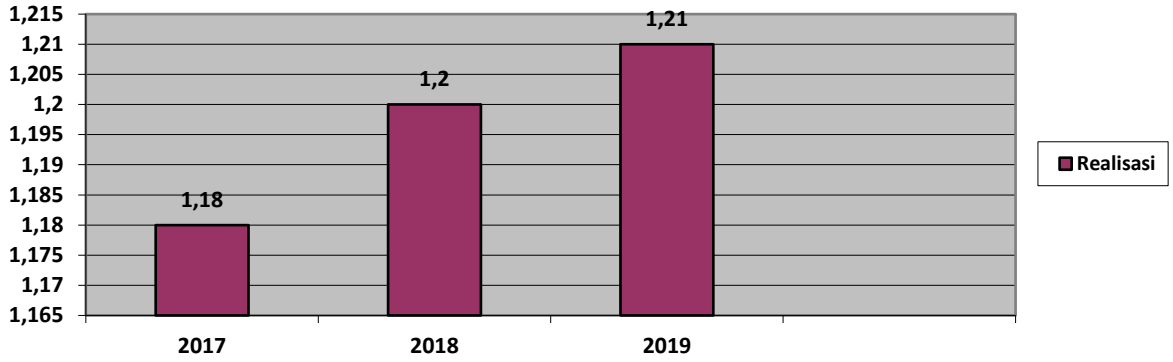

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Masih rendahnya memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Peningkatan sosialisasi secara berkesinambungan kepada peserta didik tentang materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Peningkatan penyuluhan memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik. secara tatap muka melalui Ajang kreatif Gen-Re (Generasi Berencana).

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN);
- Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan , Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan;
- Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;

- Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.

  Foto Kegiatan : Sosialisasi Materi kependudukan jalur Non Formal dan Informal yang dimpin oleh Buapti Tanah Laut, Kepala dinas P2KBP

Foto : Kegiatan Ajang Kreatif Gen-Re (Generasi Berencana) , program Gen-Re merupakan program BKKBN pusat yang meng-edukasi pemuda untuk menghindari terjadinya pernikahan dini, dari anak muda sudah merencanakan, tidak hanya kelahiran, tapi mulai dari merencanakan pendidikan, kesempatan bekerja, baru merencanakan keluarga.

Sasaran Strategis -2 Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Total Fertility Rate (TFR	%	2,33	2,99	128,32	Udk:Jumlah perempuan lahir/Jmlh total **pr** Kab.Tala x1000

$\sum_i^7 = 1$

TFR = 5 ASFR i

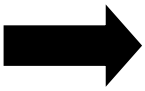

5 x 0,45 (Data didapat berdasar hasil susenas Tahun 2019

Total Fertility Rate (TFR) dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Target *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2019 sebesar 2,33% dan pada tahun 2019 dicapai penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,99 % proses pendataan dari Susenas. Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Keluarga Berencana ***(Bidang Keluarga Berencana)*** dan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana, ***(Seksi Pemberdayaan keluarga)***

(Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana) ***(dikerjakan oleh Eselon II & III)***

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun		**2,54**	**2,99**	**2,22**

		2,58 (1.189/162.848)x5	(842/165.176)x5	(2.227/ 167.571)x5	

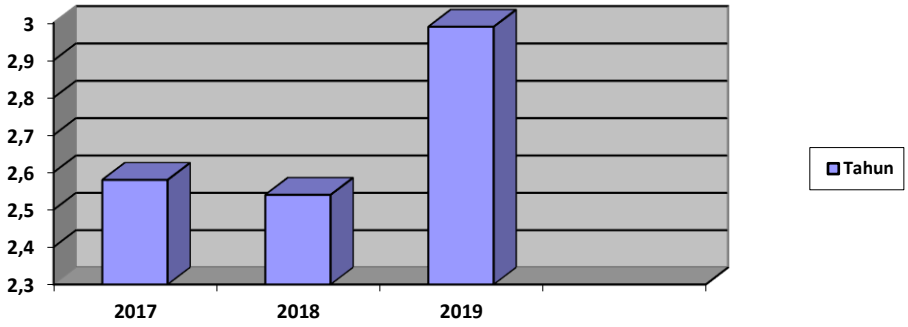

Gerakan untuk membentuk keluarga kecil yang sehat dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran dan perencanaan jumlah keluarga dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi Jangka panjang yang efektif dan efisien seperti implant, IUD, MOP, MOW.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dam Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP)
- Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Penambahan formasi PLKB ;
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran;
- Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak (siaran Radio, brosur,Leafleat dan Spanduk).

Faktor pendukung / Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan

KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan;

- Adanya peran Tenaga PLKB dan PKB serta PPKBD di tiap desa.
- Memberikan informasi secara berkesinambungan untuk menjadi peserta KB;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana serta jaminan ketersediaan Alat dan obat Kontrasepsi yang memadai (Mobil Alokon) ;

Foto : Mobil Distribusi untuk mengantar Alat dan obat kontrasepsi ke klinik tingkat desa.

Sasaran Strategis -3 Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
3	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Angka Pemakaian kontrasepsi bagi Perempuan Menikah usia 15-49 tahun	%	77,76	83,60	107,51	

Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) X 100 % → 53.679 / 64.208 x 100 % = 83,60

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga. Pada tahun 2019 didapatkan 83,60% Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber KB aktif dengan rincian jumlah peserta KB aktif 53.679 akseptor dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 64.208 akseptor. Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Keluarga Berencana **(*Bidang Keluarga Berencana)*** dan kegiatan pembinaan Keluarga Berencana, ***(Seksi Ketahanan keluarga).*** **Kegiatan ; Pembinaan Petugas pengelola program KB dan Keluarga Sejahtera. (dikerjakan oleh Eselon IV)**

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
3	Angka Pemakaian kontrasepsi bagi Perempuan Menikah usia 15-49 tahun	78,76	80,81	83,60	77,76

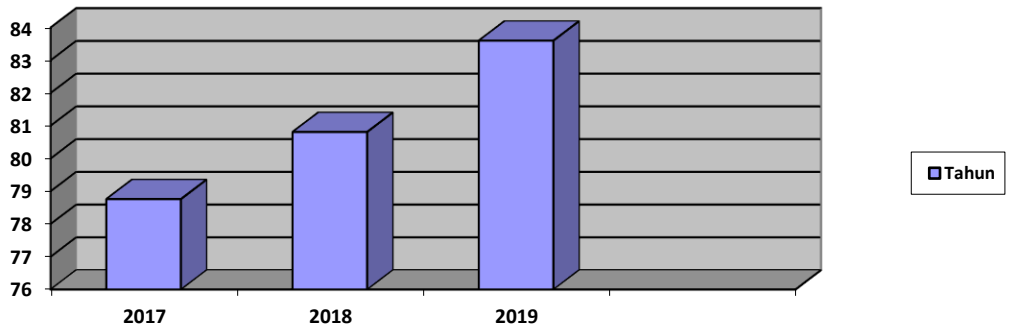

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dam Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP)
- Kurangnya tenaga penyuluh yang terampil di Desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Penambahan formasi PLKB
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran.

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan, Tenaga PLKB dan PKB serta PPKBD di tiap desa.
- Tersedianya kader PPKBD dan sub PPKBD di setiap desa
- Dukungan dana dari DAK Pusat baik Fisik maupun Non Fisik
- Orientasi pelayanan konseling KB

FOTO : Kegiatan Pelayanan KB Gratis Pada acara Manunggal Tuntung Pandang di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari.

Sasaran Strategis -4 Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet- Need).

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet-Need)	%	9	8,12	90,22	

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak dilayani **dibagi** Jumlah PUS x 100%

$$\frac{\textbf{IAT,TIAL}}{\textbf{PUS}} \times 100 \quad \Rightarrow \quad \frac{5.214}{64.208} \times 100 = 8{,}12$$

Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi.Tingginya angka unmet Need dalam permasalahan program KB berakibat rendahnya prevalensi kontrasepsi sehingga memicu tingginya angka kelahiran dan terjadi tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk. Khusus BKKBN memiliki target Unmet Need KB sebesar 7% .Namun kenyataannya dinas P2KBP3A kabupaten Tanah Laut dari tahun 2014 – 2018 Unmet Need KB terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2018 sebesar 10,20%, untuk tahun 2019 target Unmet Need pada dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah laut sebesar 9% terealisasi 8,12% capaian kinerja 90,22%

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Keluarga Berencana **(*Bidang Keluarga Berencana)*** dan ***(Seksi Ketahanan keluarga)*** **Kegiatan : Pengelolaan program KB di masyarakat. (dikerjakan oleh eselon IV)**

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet-Need)	12,76	10,20	8,12	9

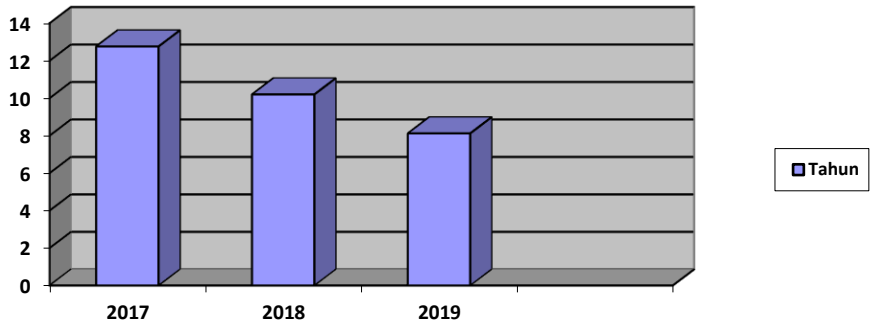

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Kurangnya dukungan dari suami, informasi dan budaya yang masih dipegang teguh oleh PUS;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas dan cakupan informasi, pelayanan serta penguatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (TOMA,dan Tokoh Agama (TOGA).
- Masih rendahmya kualitan pelayanan dan cakupan informasi, pelayanan serta penguatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (TOMA,dan Tokoh Agama (TOGA).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Meningkatkan cakupan akseptor KB dengan melibatkan suami dan keluarga;
- Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat , TNI Manunggal KB dan TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan);
- Peningkatan kualitas dan cakupan informasi, pelayanan serta penguatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (TOMA,dan Tokoh Agama (TOGA)

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Meningkatkan penggerakan lini di lapangan dengan memberdayakan Institusi Masayarakat Pedesaan (IMP);
- Menyiapkan bahan-bahan KIE (Komunikasi ,Infromasi dan Edukatif) yang bersifat Edukatif bagi keluarga dalam merencanakan keluarganya;
- Melaksanakan konseling KB untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam ber-KB benar-benar mantap dan lestari.

Foto : Kegiatan TNI Manunggal KB dan TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan) di setiap kecamatan dan Desa pada acara Manunggal Tuntung Pandang.

Sasaran Strategis - 5 Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/Kelurahan.

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan

5	Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan	%	100	100	100	

Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia x 100%

Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga.

Tahun 2019 Pelaksanaan pendataan keluarga menjadi program prioritas Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut karena dilaksanaan pada awal RPJMD 2019-2023, selain itu pendataan keluarga tahun 2019 mendapatkan dukungan dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Tanah Laut tentang kampung KB Nomor 188.45/798-KUM/2017 . Hasil pendataan keluarga tahun 2019 harus menjadi primadona untuk menjawab kebutuhan data dan informasi pembangunan keluarga.Kabupaten Tanah Laut sudah membentuk Rumah dataku dari 11 kecamatan sebanyak 22 dan sudah di resmikan oleh Bupati Tanah Laut sebanyak 4 desa atau 18,18%

Tahun 2019 target penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan sebesar 100% dan terealisasi 100% berupa satu(1) buah dokumen.

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri **(*Bidang data, Informasi dan kependudukan)*** dan ***(Seksi Analisa Data dan Pelaporan)*** **Kegiatan : Pengelolaan data dan informasi program KB.**

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023

5	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan	100	100	100	100

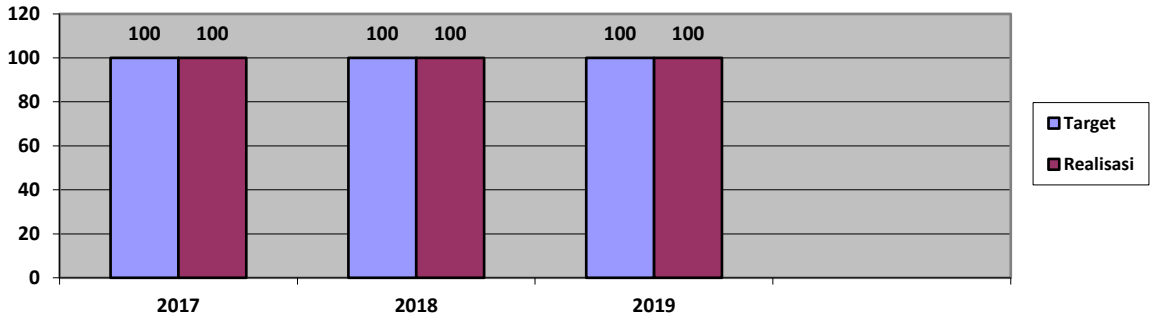

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Laporan data yang diminta dari Kabupaten ke kecamatan tidak tepat waktu;
- Sulitnya mengumpul data tepat waktu dan Akurat;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Pembinaan dan melaksanakan Monev ke Kecamatan;
- Melaksanakan sosialisasi tentang data;
- Perbaikan aplikasi sistem informasi data sering terjadi gangguan;

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Melakukan tatap muka denga PKB masing-masing kecamatan;
- Pembinaan ke PKB secara berkesinambungan/kontinyu;
- Sosialisasi tentang Aplikasi data.

- Membentuk/Membuat Rumah Dataku di setiap Desa.

-

Foto : Kegiatan Peresmian Rumah Dataku oleh Bapak Bupati Tanah Laut di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap tanggal 11 Oktober 2019

Sasaran Strategis - 6 .Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
6	Terbentunya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Sekolah	11	6	54,54%	

Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan

1).SMP Negeri 3 Pelaihari, **2).**SMP Negeri 2 Pelaihari, **3)**.SMP Negeri I Pelaihari, **4).**MAN Insan Cendekia Tala, **5).**SMK Negeri I pelaihari, **6).**SMP Negeri 5 Pelaihari

Untuk tahun 2019 dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut target SSK sebanyak 11 sekolah telah terbentuk dan realisasi sebanyak 6 sekolah atau sebesar 54,54% adapun sekolah yang terbentuk diantaranya : SMP Negeri 3 Pelaihari, SMP Negeri 2 Pelaihari, SMP Negeri I pelaihari, MAN Insan Cendekia Tala, SMK Negeri I pelaihari.

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Keluarga Berencana **(*Bidang Pengendalian Penduduk,Data dan Informasi)*** dan ***(Seksi Pengendalian penduduk)*** **Kegiatan : Pembinaan koalisi Kependudukan. (dikerjakan oleh Eselon IV)**

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	–	–	6	30 Sekolah
Program Sekolah Siaga Kependudukan merupaka kebijakan dari Pusat tahun 2019, jadi sebelumnya tidak ada target SSK.					

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke sekolah tentang perencanaan kependudukan;
- Memberikan informasi tentang kependudukan lewat media cetak, brosur-brosur, buku-buku, pamflet dan spanduk;
- Membentuk SSK di setiap Sekolah.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Terbatasnya dana untuk membentuk SSK, sehingga tidak semua sekolah di bentuk SSK;
- SSK yang belum terbentuk akan d bentuk pada TA yang akan datang;
- Terbatasnya SDM yang terampil dalam mengelola SSK.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan dan membuat Telaahan Staf (TS) kepada Pem-Da untuk menambah anggaran tentang SSK ;
- Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek SDM tentang SSK.

Foto : Kegiatan Sosialisasi materi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) oleh Bupati Tanah Laut tanggal 25 Februari 2019 di Aula Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah laut

Sasaran Strategis - 7

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
7	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,40	65,96	96,43	
	1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)	**Keterangan :** Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan /Tenaga Profesi Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan					

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 68,40% Realisasi 65,95% dengan Capaian 96,41%

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan **(*Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)*** dan ***(Seksi Pemenuhan Hak Anak)*** **Kegiatan :** Peningkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak. (dikerjakan oleh esselon III)

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	65,99	65,95	65,95

2) Sumber : BPS Tahun 2019

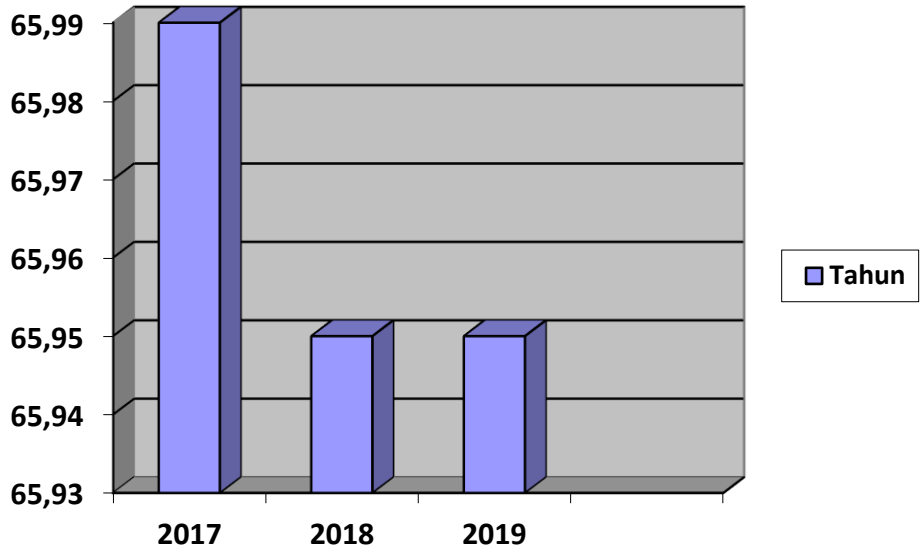

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik,

IDG terdiri dari 3 (tiga) Indikator komposit yaitu :

4) Indeks keterwakilan di parlemen artinya Keterlibatan perempuan di parlemen **masih rendah**;
5) Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan indicator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja professional dan teknisi **masih rendah** dan masih didominasi kaum laki-laki;
6) Peran perempuan dalam sumbangan pendapatan keluarga dengan indicator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan, di Kabupaten Tanah Laut upah buruh untuk kaum perempuan masih rendah sehingga membawa dampak **rendahnya** sumbangan pendapatan perempuan.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG);

- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG);
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

Faktor pendukung / Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

- Penyempurnaan proses pembentukan peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender ;
- Pelaksanaan revieu dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender;
- Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG
- Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum,masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi , pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat;
- Penguatan system penyediaan , pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	Uraian	20117	2018	2019

1	Keterlibatan perempuan di parlemen	17,14%	17,14%	25,71%
2	Perempuan sebagai tenaga profesional	47,47%	45,44%	45,448%
3	Sumbangan pendapatan perempuan	28,00%	27,99%	29,68%

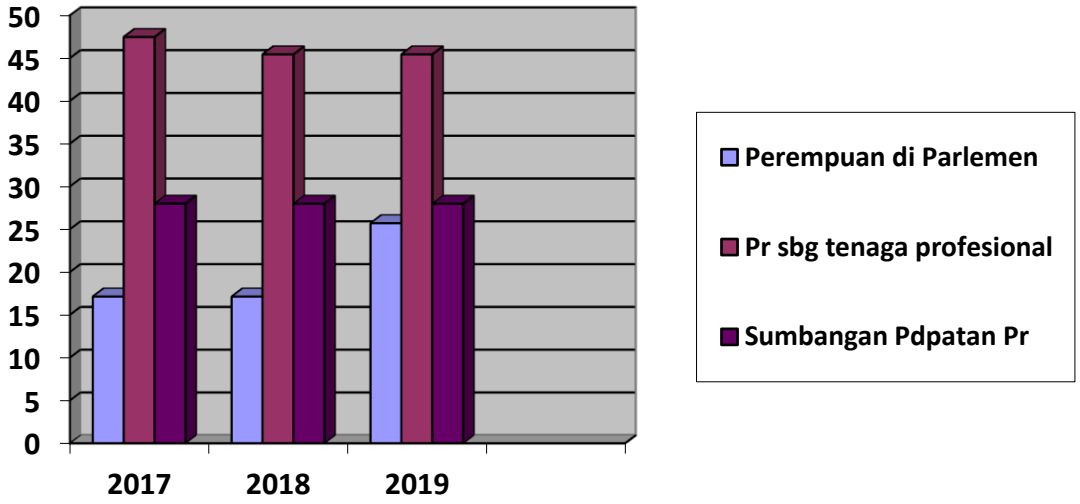

Foto :

Kegiatan Pembinaan P2WKSS tanggal 27 Mei 2019

Foto : Kegiatan pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Kasih Sayang Ibu(KSI).

asaran Strategis - 8 .Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Srategis 8**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
8	Meningkatnya Pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	~ Prosentase perempuan korban kekerasan	%	100	100 (19 kasus)	100	Kasus terselesaikan 19 kasus
		~Prosentase anak korban kekerasan	%	100	100 (15 kasus)	100	Kasus terselesaikan 15 kasus

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yg ditindaklanjuti X 100 %
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor

$\frac{19}{19} \times 100$

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yg ditindaklanjuti X 100 %
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang melapor

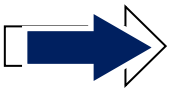

$\frac{15}{15} \times 100$

Foto : **Kegiatan** Sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan Anak dan STOP Perkawinan Usia Anak acara manunggal Tuntung Pandang Pemerintah Daerah Kab.Tala dan Forum koordinasi Implementasi Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Dalam melaksanakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pelayanan terpadu dalam suatu wadah yang bernama P2TP2A.

P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi : pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis dengan rujukan secara gratis. Tujuannya yaitu melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pada tahun 2019 ini terdapat 34 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tabel berikut:

NO	JENIS KEKERASAN	P2TP2A		
		Perempuan	Laki - Laki	Jumlah
1	Fisik	3	-	3
2	Psikis	3	-	3

3	Seksual	10	4	14
4	Penelantaran	-	2	2
5	Perdagangan Orang	-	-	-
6	Eksploitasi	-	-	-
7	Lainnya	3	9	12
	Jumlah Kasus	19	15	34

Dari data yang tampak pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 kasus adalah psikis sebanyak 3 kasus, kasus kekerasan fisik dan 3 kasus, kekerasan seksual pada perempuan dan anak 14 kasus, penelantaran anak 2 orang. Dengan jumlah korban anak 34 orang (6 orang anak mengalami jenis kekerasan fisik disertai psikis, 4 orang anak mengalami jenis kekerasan psikis disertai seksual, 2 orang anak mengalami jenis kekerasan seksual, 3 orang mengalami jenis kekerasan psikis dan 1 orang mengalami jenis kekerasan fisik, psikis dan seksual) dan perempuan 2 orang (1 orang mengalami jenis kekerasan seksual disertai psikis dan 1 orang mengalami jenis kekerasan fisik disertai psikis).

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan **(*Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)*** dan ***(Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak)*** **Kegiatan :** Pendampingan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak. (dikerjakan oleh Esselon III).

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023

8	~ Prosentase perempuan korban kekerasan	100 (30 kasus)	100 (12 kasus)	100 (19 kasus)	100
	~Prosentase anak korban Kekerasan	100 (101 kasus	100 (71 kasus	100 (15 kasus)	
J U M L A H		100 (131 kasus	100 (83 kasus	100 (34 kasus)	

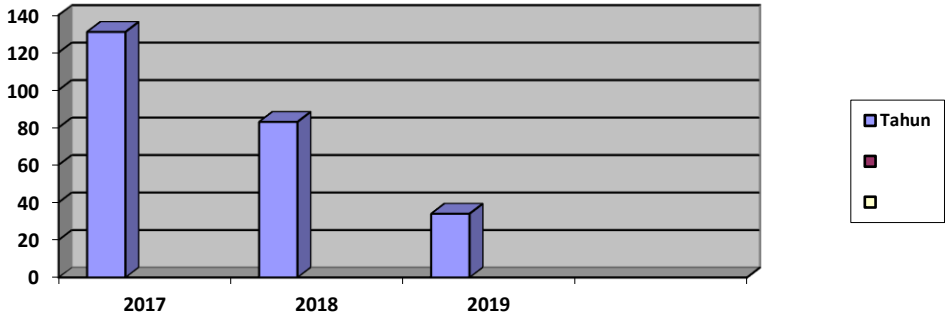

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1) Lemahnya penguatan fungsi keluarga, peran sekolah , pendekatan lembaga masyarakat hingga dunia usaha;
2) Banyaknya materi-materi bermuatan pornografi yang membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda sehingga berpotensi terjadinya kekerasan seksual dan dekadensi moral di masyarakat.
3) Rendahnya pendekatan dan pemahaman dari tokoh masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
4) Kurangnya komitmen dan pemahaman dari SOPD/Lintas sektoral tentang hak-hak anak ataupun Konvensi Hak Anak (KHA) serta pembentukan forum anak di tingkat Kabupaten.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1) Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, KDRT, TPPO dan Pornogafi secara rutin;
2) Memberikan advokasi kepada pengelola PPT di Kabupaten/Kota;

3) Melakukan sosialisasi fungsi keluarga, peran sekolah , pendekatan lembaga masyarakat hingga dunia usaha;

4) Melakukan koordinasi secara intens terhadap instansi lintas sektor melalui implementasi program yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah yang ada dalam Gugus Tugas Traficking dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);

5) Bersama-sama dengan Swadaya Masyarakat melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekolah baik di tingkat SMU dan SLTP dan juga melakukan advokasi/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :

1) Melakukan kerjasama dari lintas sektor seperti kepolisian dan rumah sakit dalam hal visum advokasi / pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
2) Dukungan dari tenaga pysikolog dalam melakukan advokasi / pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
3) Me-optimalkan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
4) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak mengenai kekerasan yang rentan terjadi ;
5) Melakukan Sosialisasi, pelatihan dan kampanye anti kekerasan.

Sasaran Strategis - 9 Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak

- **Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Catatan

9	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Layak Anak(KLA).	~ Tingkat Capaian Kabuapaten Layak Anak (KLA)	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN Kriteria penghargaan Kabupaten Layak Anak → Hasil Penilaian Kementrian PPPA						

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pada tahun 2019 ini juga, telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi/Penggarapan GugusTugas KLA Kecamatan/Desa layak anak sebanyak 2 Kecamatan/Desa dari target 11 Kecamatan/Desa layak anak di tahun 2020 sisa 9 Kecamatan/Desa yang akan digarap).

Pada tahun 2019 ini sudah mendapatkan hasil penilaian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dengan kriteria predikat **Pratama (551) skor penilaian tidak mencapai ke Madya (700) karena ada beberapa indikator tidak terpenuhi**

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja sasaran tersebut melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan **(*Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)*** dan ***(Seksi Pemenuhan Hak Anak)*** **Kegiatan :** Peningkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak.(dikerjakan oleh Esselon II)

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
9	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak(KLA).	204,1	541,70 (Pratama)	551 (Pratama)	700 (Madya)

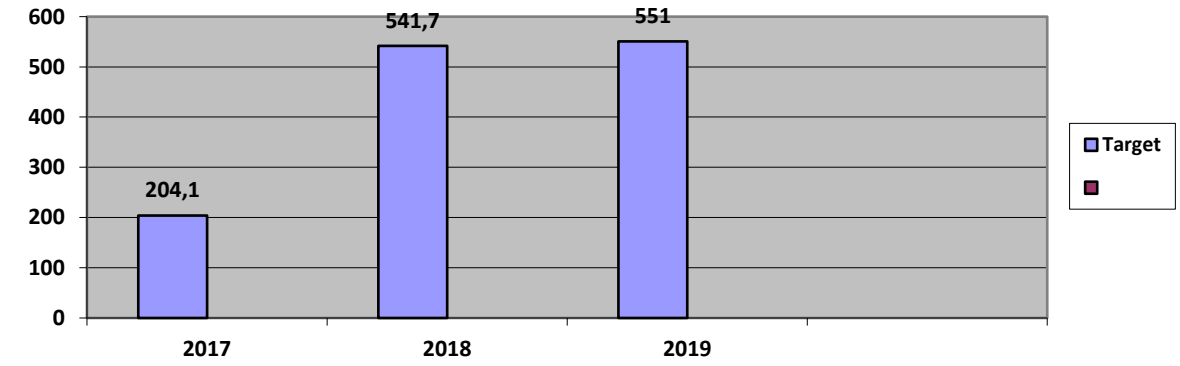

1. **<u>Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :</u>**

1) Tidak semua anak di Kabupaten Tanah Laut memiliki akta kelahiran ;

2) Masih ditemukan anak putus sekolah (Drop- out) ;

3) Belum optimalnya sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak;

4) Dalam rakor Tim Gugus Tugas KLA kadang yang menghadiri berganti-ganti orang atau utusan;

5) Masih minimnya kapasitas kelembagaan pelaksanaan KLA, seperti Sap-Ras dan SDM sehingga baselin data tentang anak kurang ter-inventarisir.

2. **<u>Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :</u>**

1) Melakukan pembuatan akte kelahiran secara gratis;

2) Melaksanakan pendataan anak putus sekolah (Dop-Out) dgn dinas terkait;

3) Melakukan sosialisasi lintas sektoral mengenai pemenuhan hak anak;

3. <u>Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :</u>

1) Komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) ;
2) Advokasi dan sosialisasi kebijakan KLA kepada beberapa pihak terkait ;
3) Membentuk Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
4) Program KLA Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam Rencana Aksi daerah (Instruksi Bupati Tanah Laut No.4/2019);
5) Monitoring dan Evaluasi pada setiap kegiatan akhir tahun oleh Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Tanah Laut.

Keg. No. 3

4) Membuat kan SK Tim Gugus Tugas KLA sesuai yang membidangi KLA dari masing-masing dinas terkait ;
5) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
6) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;

<u>SASARAN STRATEGIS 10.</u> **<u>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik</u>**

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 10 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik sebagaimana berikut:

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2019	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**%**	95	91,26	96,06	Belum Tercapai
2	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	**%**	BB (75)	BB (70,40)	93,87	Data realiasi thn 2018 krn thn 2019 **blm dinilai**

FORMULASI REALISASI CAPAIAN

Rata-rata survey pada unit pelayanan balai penyuluh KB Kecamatan lingkup Dinas P2KBP3A Kab. Tanah Laut → Sudah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

Hasil penilaian SAKIP → Belum dilaksanakan penilaian Laporan SAKIP Tahun 2019

Foto : Kegiatan Rapat koordinasi dan tindak lanjut penyusunan IKU tanggal 11 November 2019 dipimpin Kepala dinas P2KBP3A Kab.Tala di Aula Dinas P2KBP3A.

Pencapaian sasaran strategis 10 akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didapat dari hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2019 sudah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Laut.

Beberapa unsur pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat antara lain :

a. Kesesuaian Persyaratan dengan pelayanan;
b. Kemudahan Prosedur pelayanan;
c. Ketepatan Waktu Pelayanan;
d. Kesesuaian Biaya Pelayanan;
e. Kepastian Produk Layanan;
f. Kompetensi Petugas Layanan;
g. Perilaku Pelaksana;
h. Kejelasan Maklumat Pelayanan; dan
i. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan pelayanan

2. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2019 total keseluruhan 150 kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis.

Foto : Kegiatan pengisian kuesioner IKM di aula Dinas P2KBP3A Kabupaten Tala

3. Indikator nilai hasil evaluasi SAKIP

Nilai hasil evaluasi SAKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi SAKIP SKPD menunjukan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi SAKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kab.Tanah Laut Target nilai evaluasi SAKIP pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Laut yang ditetapkan pada Tahun 2019 kategori BB (75)

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kab. Tanah Laut untuk memperoleh nilai A.

- **Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Lalu**

	INDIKATOR KINERJA SASARAN	**TAHUN 2016**	**TAHUN 2017**	**TAHUN 2018**	**TAHUN 2019**	**TARGET RENSTRA 2023**
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,53 **(A)**	102,26 **(A)**	94,18 **(A)**	91,26 **(A)**	95 **(A)**

Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

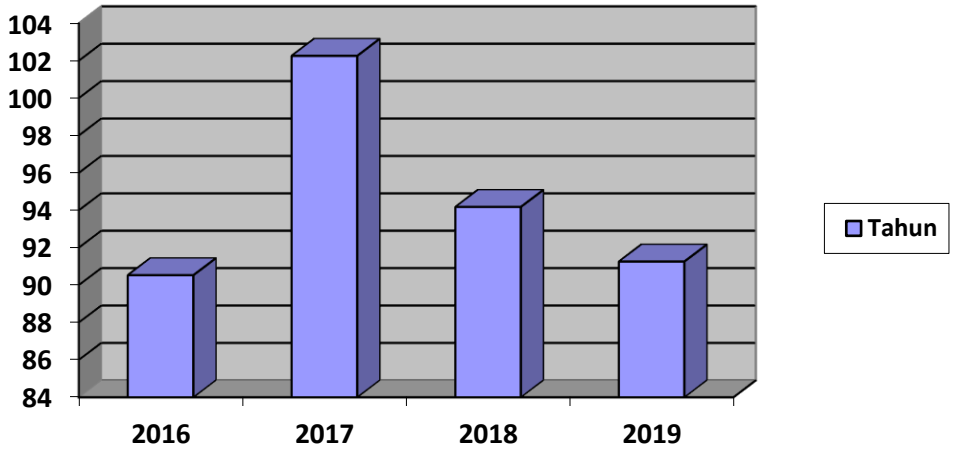

Diagram Evaluasi SAKIP

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
1	Nilai evaluasi SAKIP	**B** (60,12	**B** (68,60)	**BB** (70,40)	**BB** (70,40)	**BB** (75)

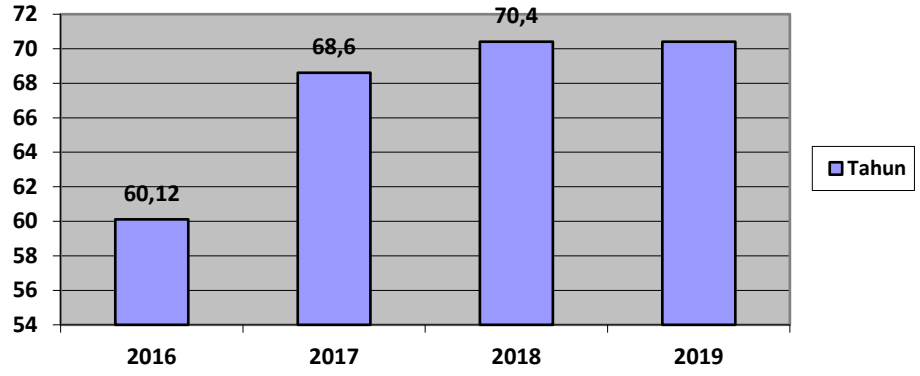

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Keterbatasan petugas yang memberikan pelayanan;
- Keinginan dan harapan dari masyarakat agar pelayanan dapat diterima dengan cepat sementara pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan dukungan tenaga tenaga kesehatan setempat;
- Memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan;
- Memasang keterangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang pelayanan.(dikerjakan oleh Esselon IV)

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas PP, KB , PP dan PA sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Ringkasan realisasi APBD pada Tahun 2018 terhadap 2019 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI 2018	%	REALISASI 2019	%
	BELANJA DAERAH				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	Belanja Pegawai	**3.449.800.617**	**62,94**	**3.814.958.642**	**73,19**
	BELANJA LANGSUNG	**4.263.691.452**	**79,98**	**3.814.958.642**	**73,19**
I.	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***621.130.734***	***94***	***749.217.571***	***96***
II.	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***43.263.919***	***79***	***48.908.000***	***80***
III.	***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***	***5.550.000***	***100***	***0***	***0***
IV.	***Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak***	***362.545.890***	***81***	***164.610.500***	***62***
V.	***Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan***	***67.359.200***	***84***	***71.789.000***	***88,16***
VI	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**	***212.907.000***	***79***	***140.033.900***	***74***
VII	**Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media**	***10.715.000***	***99***	***14.083.000***	***94***
VII.	***Program Keluarga Berencana***	***514.578.000***	***91***	***357.034.400***	***87***
VIII	**Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang Mandiri**	***501.539.238***	***90***	***812.421.950***	***96***

IX	***Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR***	***0***	***0***	***63.923.100***	***98***
X	**Program KKBPK (Kerpendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga) Lini Lapangan (DAK Non Fisik)**	***1.573.696.830***	***74***	***1.534.262.380***	***67,83***
XI	**Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB**	***376.780.141***	***94***	***632.125.000***	72
XII	**Program Pengendalian Penduduk**	***0***	***0***	***44.463.000***	79

Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.331.259.333,-**

Dengan rincian sebagai berikut :

Rincian **Anggaran pada DPA dan DPPA Dina P2KBP3A** Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 5.331.259.333,-** terdiri untuk :

1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 5.225.983.786,-
2. Belanja Langsung Rp. 6.252.942.792,-

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan DALAM RANGKA PENCAPAIAN Sasaran 3 (Tiga) dan indikator sasaran sebanyak 12 (Dua Belas), yaitu :

1. Program Sekretariat :
   - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Program Displin Aparatur
2. Program Pembangunan
   - Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Program Keluarga Berencana

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 realisasi anggaran pada P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dari alokasi sebesar **Rp. 6.252.942.792,-** terealisasi sebesar Rp. **4.883.954.801,-** dapat sisa anggaran sebesar Rp.1.368.987.991,-/ Sisa anggaran tersebut terdiri dari :

- Belanja Sekretariat terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 30.780.558,- dari total Rp.779.998.129,- Hal ini dikarenakan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor hanya terserap 58% (4.393,800,- Realisasi Rp.2.559.400,- Keg.Jasa Administrasi Kuangan terealisasi 12%(6.305.000,-Realisasi Rp.732.000.) Keg.penyediaan komponen instalasi listerik/penerangan bangunan kantor terserap 100% (.070.200 Realisasi Rp.2.060.000), Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional terserap 75% (39.750.000 Realisasi Rp.29.930.000). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor terserap 66% (2.880.000 Realisasi Rp.1.895.000).
- Bidang Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sisa Anggaran Rp. 65.713.813,- dari total sebesar Rp.145.690.463,-terealisasi sebesar Rp.79.976.650,- (55%) Hal ini sisa dana pyisikolog dan sisa perjalanan dinas.
- Pembinaan Organisasi Perempuan sisa Anggaran Rp. 49.246.800,- dari total sebesar Rp.189.280.700,-terealisasi sebesar Rp.140.033.900,- (74%) Hal ini sisa perjalanan dinas.

BAB IV
PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) dengan realisasi sebesar 1,21% dari target 1,66% dengan Capaian kinerja 72,89 %**.**

SASARAN 2 : Menurunnya Angka Kelahiran (TFR) per WUS (15-49 tahun) realisasi sebesar 2,99%, dari target 2,33 % dengan capaian kinerja 128,32 %.

SASARAN 3	:	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi mCPR realisasi sebesar 83,60 % dari target 77,76 % dengan capaian kinerja 107,51 %
SASARAN 4	:	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) realisasi sebesar 8,12 % dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 90,22 %
SASARAN 5	:	Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan realisasi sebesar 100 dari target 100 % dengan capaian kinerja 100%.
SASARAN 6	:	Terbentuknya Sekolah Siaga kependudukan realisasi sebesar 6 SSK dari target 11 SSK dengan capaian kinerja 54,54%.
SASARAN 7	:	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender realisasi 65,96% dari target Skor Madya 700 dengan capaian kinerja 80,71%.
SASARAN 8	:	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan anak korban tindak kekerasan terealisasi 100 % tertindak lanjuti dari jumlah 34 kasus.
SASARAN 9		Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (KLA) realisasi kriteria Pratama dengan Skor 551 dari target Skor Madya 700 dengan capaian kinerja 78,71%.
SASARAN 10		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik. dengan indikator : -Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 91,26% -Nilai ecaluasi AKIP dengan Skor 70,40 (BB)

1.2 KENDALA YANG DIHADAPI ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas pengendalian Penduduk,Keluarga berencana,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah :

- Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Masih rendahnya memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.

- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dam Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP);
- Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa ;
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG);
- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.
- Tidak semua anak di Kabupaten Tanah Laut memiliki akta kelahiran ;
- Masih ditemukan anak putus sekolah (Drop- out) ;
- Belum optimalnya sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak;
- Dalam rakor Tim Gugus Tugas KLA kadang yang menghadiri berganti-ganti orang atau utusan;

1.3 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Langkah – langkah kedepan yang akan dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya adalah :

- Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN);
- Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan , Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan;
- Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Penambahan formasi PLKB ;
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi,

informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran;

- Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak (siaran Radio, brosur,Leafleat dan Spanduk).
- Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG);
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.
- Melakukan pembuatan akte kelahiran secara gratis;
- Melaksanakan pendataan anak putus sekolah (Dop-Out) dgn dinas terkait;
- Melakukan sosialisasi lintas sektoral mengenai pemenuhan hak anak;

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Januari 2020
Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut

Ir. WIYANTO, M.Si
NIP. 19610313 199003 1 005